

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. Kesimpulan

Merujuk kepada hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya berdasarkan fenomena-fenomena yang ditemukan di lapangan, maka dapat dirumuskan kesimpulan terkait Kebijakan-kebijakan Kepala Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah X Kota Jambi sebagai berikut:

##### 1. Kondisi Faktual Kebijakan Kepala Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah X Kota Jambi

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kondisi faktual kebijakan kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah X kota Jambi, dimana terdapat beberapa aspek terkait kebijakan kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif seperti, kebijakan kepala sekolah dalam penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus, kebijakan kepala sekolah dalam perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan, kebijakan kepala sekolah terhadap penyesuaian kurikulum, kebijakan kepala sekolah terhadap kegiatan pembelajaran pada seting pendidikan inklusif, kebijakan kepala sekolah dalam pendanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif, kebijakan kepala sekolah dalam pengadaan sarana dan prasarana pada penyelenggaraan pendidikan inklusif, maka dapat disimpulkan berdasarkan aspek-aspek tersebut sebagai berikut:

- a. Kebijakan kepala sekolah dalam penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dilakukan kepala sekolah dalam penerimaan peserta didik khususnya peserta didik berkebutuhan khusus yaitu diadakannya tes terlebih dahulu. Adapun tes yang diadakan adalah tes Intelegensi (IQ) yang dilakukan oleh psikolog

yang diundang langsung oleh kepala sekolah. Selanjutnya adalah asesmen, yang dilakukan oleh guru-guru Sekolah Luar Biasa yang mana merupakan bentuk kerjasama antara Sekolah X dan SLB.

- b. Kebijakan kepala sekolah dalam perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa di Sekolah X Kota Jambi belum ada guru berlatarbelakang Pendidikan Luar Biasa/Pendidikan Khusus. Sehingga untuk guru pembimbing khusus (GPK) kepala sekolah memberikan kebijakan kepada orang tua untuk mencari sendiri pendamping anak, atau orang tua sendiri boleh untuk mendampingi anak di dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung.
- c. Kebijakan kepala sekolah dalam penyesuaian kurikulum bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh kepala sekolah terkait kurikulum, yaitu memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada guru kelas untuk memberikan materi dan membuat program pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan anak. Untuk pembuatannyapun kepala sekolah memberikan kebijakan kepada guru untuk dapat bekerja sama menyusun program pembelajaran tersebut bersama pendamping/orang tua peserta didik.
- d. Kebijakan kepala sekolah terhadap kegiatan pembelajaran pada seting pendidikan inklusif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa untuk kegiatan pembelajaran pada seting pendidikan inklusif, kepala sekolah memberikan kebijakan sepenuhnya kepada guru di kelas untuk mengkondisikan kelasnya masing-masing. Meminta guru menggunakan pendekatan-pendekatan atau metode-metode mengajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Selanjutnya dimana kepala sekolah juga meminta para guru untuk mendesain kelas senyaman mungkin, dan membuat

suasana kelas menjadi lebih inklusif. Salah satunya adalah seting tempat duduk.

- e. Kebijakan kepala sekolah dalam pendanaan pendidikan inklusif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa minimnya perhatian dari pemerintah provinsi dan kota menjadikan pendanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah X Kota Jambi berjalan mandiri. Sehingga kepala sekolah membuat kebijakan untuk membuat proposal pengajuan dana, sehingga saat ini telah ada beberapa donatur-donatur yang memberikan perhatian kepada Sekolah X Kota Jambi, terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- f. Kebijakan kepala sekolah dalam pengadaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan inklusif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dilakukan kepala sekolah adalah, mendirikan beberapa bangunan dan perbaikan infrastruktur dimana hal ini untuk menciptakan suasana yang inklusif dan aksesibilitas yang mudah dijangkau dan digunakan oleh peserta didik berkebutuhan khusus.

## **2. Peran Kepala Sekolah dalam Pengambilan Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah X Kota Jambi**

- a. Peran kepala sekolah sebagai educator dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang diambil kepala sekolah sebagai educator adalah melakukan pembinaan kepada guru tentang pendidikan inklusif dan memberikan pemahaman kepada orang tua tentang pendidikan inklusif setiap tahunnya.
- b. Peran kepala sekolah sebagai manajer dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang diambil kepala sekolah sebagai manejer adalah pada konsistensi kepala sekolah dalam

menjalankan pendidikan inklusif di sekolah X Kota Jambi. Tentunya untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif di perlukan manajemen yang baik, disinilah peran kepala sekolah sebagai seorang manejer.

- c. Peran kepala sekolah sebagai administrator dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang berkaitan dengan administrasi adalah kebijakan kepala sekolah dalam pendanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- d. Peran kepala sekolah sebagai supervisor dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kebijakan kepala sekolah sebagai supervisor dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah bekerjasama dengan coordinator pendidikan inklusif untuk menilai sejauh mana guru kelas mampu memberikan pembelajaran terhadap peserta didik berkebutuhan khusus. Kebijakan ini merupakan langkah yang di ambil kepala sekolah sebagai seorang yang ikut mengawasi dan menilai kinerja para guru dalam menyukseskan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah X Kota Jambi. Selain itu ikut terlibat dalam proses penerimaan peserta didik baru khususnya peserta didik berkebutuhan khusus.
- e. Peran kepala sekolah sebagai leader dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait peran kepala sekolah sebagai leader dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat disimpulkan bahwa sebagai seorang pemimpin tentu kepala sekolah memiliki wewenang dalam pengambilan kebijakan, kebijakan yang diambil adalah tetap konsistensi dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah X Kota Jambi. Konsistensi penyelenggaraan pendidikan inklusif ini merupakan kebijakan yang diambil kepala sekolah sebagai seorang pemimpin.

- f. Peran kepala sekolah sebagai innovator dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan adapun peran kepala sekolah sebagai innovator dalam pengambilan kebijakan adalah dapat disimpulkan dimana kebijakan tersebut terkait seting pembelajaran dalam pendidikan inklusif. Kebijakan ini merupakan sebuah upaya dari kepala sekolah sebagai seorang innovator untuk memberikan semangat baru dan keantusiasan para peserta didik serta guru dalam menyukseskan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah X Kota Jambi ini.
- g. Peran kepala sekolah sebagai motivator dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dilakukan JM sebagai kepala sekolah terkait perannya sebagai seorang motivator adalah mengadakan studi banding ke sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di daerah lain. Kebijakan ini merupakan langkah yang tepat untuk membangkitkan semangat dan pemahaman para guru terhadap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

### **3. Pendukung dan Penghambat Kepala Sekolah dalam Pengambilan Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah X Kota Jambi**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait pendukung dan penghambat kepala sekolah dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah X Kota Jambi dapat disimpulkan bahwa, terdapat beberapa faktor yang mendukung kepala sekolah dalam pengambilan kebijakan. Adapun faktor pendukung tersebut antara lain:

- a. Kepala sekolah beserta tenaga pendidik dan kependidikan memiliki sikap penerimaan yang besar terhadap perbedaan-perbedaan.
- b. Adanya donator-donatur yang memberikan bantuan beasiswa kepada peserta didik berkebutuhan khusus,



- c. Kurikulum sekolah yang fleksibel,
- d. Adanya sarana dan prasarana serta sumber belajar yang mendukung, dan
- e. Dekat dengan Sekolah Luar Biasa.

Adapun faktor penghambat pengambilan kebijakan kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah X Kota Jambi antara lain:

- a. Tidak adanya guru pembimbing khusus
- b. Sikap penerimaan orang tua yang belum menerima peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar bersama anaknya.
- c. Minim dukungan dari dinas kota dan provinsi.

Selanjutnya untuk partisipasi dari semua komponen sekolah terhadap kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat disimpulkan bahwa seluruh masyarakat sekolah sangat berpartisipasi dalam menyukseskan semua kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah, terutama para pendidik/guru sangat bersemangat dalam menjalankan semua kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah.

#### **4. Rancangan Desain Kebijakan Kepala Sekolah berdasarkan Hasil Kajian Peneliti dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah X Kota Jambi**

Desain kebijakan yang disusun merupakan desain berdasarkan hasil kajian peneliti di lapangan. Desain kebijakan ini mengacu pada tiga aspek yaitu formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Sehingga tersusunlah sebuah rancangan desain kebijakan kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

### **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, dapat di rekomendasikan sebagai berikut:

**Johandri Taufan, 2013**

Kebijakan-Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Inklusif Di Sekolah X Kota Jambi

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

## 1. Orang Tua.

Masih ada beberapa dari orang tua peserta didik yang masih belum bisa menerima adanya pendidikan inklusif ini, bahkan cenderung berniat untuk membubarkan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah X Kota Jambi ini. Oleh karena itu diharapkan kepada semua orang tua dari peserta didik pada umumnya (normal) dan peserta didik berkebutuhan khusus memiliki sikap penerimaan untuk dapat menerima semua perbedaan yang ada pada setiap peserta didik. Diharapkan untuk tidak adanya sikap diskriminatif kepada semua peserta didik, memahami bahwasanya setiap anak memiliki hak belajar yang sama, dan memiliki kesempatan yang sama. Diharapkan juga orang tua dapat berpartisipasi penuh dalam semua kegiatan-kegiatan yang diadakan sekolah terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif. Serta orang tua dapat mendukung semua kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah dan sama-sama menyukseskan kebijakan tersebut.

## 2. Guru

Sebagai guru kelas, tentu kesulitan yang dihadapi oleh guru sangat banyak. Kesulitan itu sering terjadi ketika harus memahami karakter peserta didiknya. Pemberian layanan pendidikan yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik harus di fahami oleh setiap guru. Oleh karena itu di upayakan semua guru-guru dapat lebih memahami semua karakteristik peserta didik. Beberapa kebijakan kepala sekolah agar para guru dapat lebih memahami karakteristik individu setiap anak adalah dengan cara mengikutsertakan para guru dalam pelatihan-pelatihan, workshop dan seminar-seminar tentang anak berkebutuhan khusus dan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kegiatan ini dapat menambah pengetahuan para guru tentang bagaimana menangani peserta didik berkebutuhan khusus, sehingga nantinya di kelas guru mampu menciptakan proses belajar mengajar yang inklusif, yang nyaman, aman dan menyenangkan. Di harapkan guru-guru dapat berpartisipasi dalam mendukung kebijakan kepala sekolah tersebut.

### 3. Kepala Sekolah

Masih ada beberapa orang tua siswa yang belum memahami arti makna dari pendidikan inklusif di Sekolah X Kota Jambi, serta masih ada beberapa dari masyarakat sekolah terutama orang tua yang masih memandang sebelah mata bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dan sempat terhentinya program guru kunjung dari Sekolah Luar Biasa yang dulu pernah ada. Oleh karena itu Kepala sekolah harus lebih giat dalam mensosialisaikan pendidikan inklusif di Sekolah X Kota Jambi, serta dapat lebih memberikan contoh sikap terbuka dan sikap penerimaan terhadap semua perbedaan yang ada pada peserta didik. Diharapkan kepala sekolah dapat bekerjasama dengan semua komponen-komponen pelaksana pendidikan inklusif, seperti kerjasama dengan Sekolah Luar Biasa dengan mendatangi guru kunjung sebagai pengganti guru pembimbing khusus yang belum ada di Sekolah X Kota Jambi, dan bekerjasama dengan pusat-pusat terapi yang dapat membantu sekolah dalam memberikan pelatihan terkait perkembangan peserta didik. Selanjutnya kepala sekolah diharapkan dapat membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodir semua kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Serta perlu adanya penyusunan kebijakan – kebijakan terkait pendidikan inklusif yang dalam penyusunannya mengikuti semua elemen pelaksana pembuatan kebijakan tersebut.

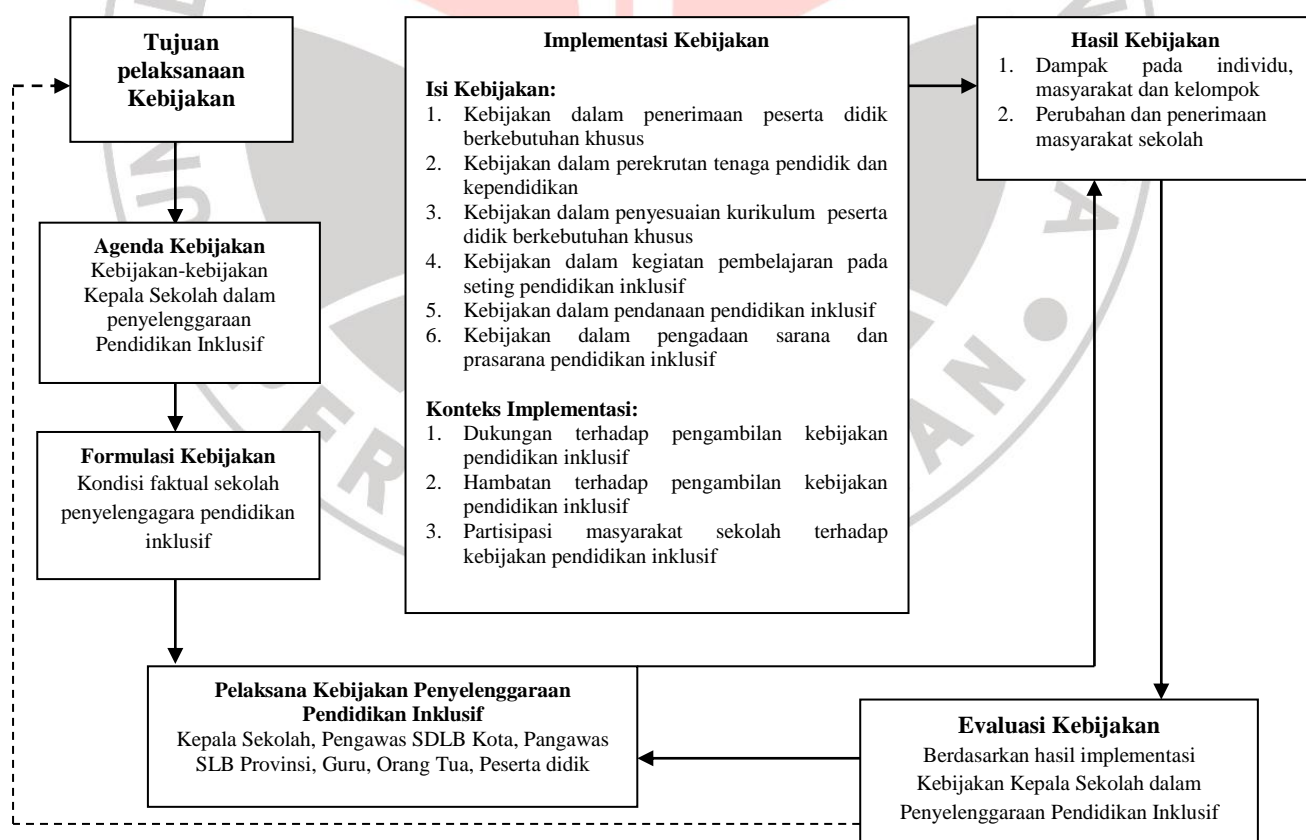
### 4. Dinas Pendidikan

Minimnya dukungan yang ada terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif di Provinsi Jambi, menjadikan beberapa sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kesulitan dalam memperoleh dukungan dan terlebih belum adanya Peraturan daerah dan peraturan Gubernur yang terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif ini. Oleh karena itu di rekomendasikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi agar dapat memberikan perhatian terhadap sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif di Provinsi Jambi terutama Sekolah X Kota Jambi yang memiliki banyak



peserta didik berkebutuhan khusus. Diharapkan agar segera menyusun peraturan daerah dan peraturan gubernur terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif ini. Diharapkan juga Dinas Pendidikan dapat mendukung program-program terkait pelaksanaan pendidikan inklusif di Sekolah X Kota Jambi dan mendukung kebijakan-kebijakan yang dibuat kepala sekolah dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang lebih baik serta perlu adanya dukungan berupa pendanaan dan penyediaan sarana prasarana serta sumber belajar yang dapat menjadikan Sekolah X Kota Jambi menjadi sekolah penyelenggara pendidikan Inklusif yang ideal..

Adapun rancangan desain kebijakan kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif ini adalah merupakan sebuah usaha peneliti untuk membantu kepala sekolah nantinya dalam merumuskan sebuah kebijakan yang lebih terarah. Oleh karena itu desain kebijakan yang di rekomendasikan adalah sebagai berikut:



**Gambar 5.1.**

**Rancangan desain Kebijakan Kepala Sekolah berdasarkan hasil kajian penelitian dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah X Kota Jambi**

Johandri Taufan, 2013

Kebijakan-Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Inklusif Di Sekolah X Kota Jambi

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu